

M. H. Lukman

Penanaman Modal Asing Berarti  
Memperkuat Kedudukan Imperialisme  
Di Negeri Kita!

# Penanaman Modal Asing Berarti Memperkuat Kedudukan Imperialisme Di Negeri Kita!

M. H. Lukman

Dalam memori jawaban Pemerintah atas laporan Gabungan Bagian-bagian tentang rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, ada satu persoalan yang tidak dijawab dengan jelas oleh Pemerintah. Persoalan itu ialah mengenai pendapat beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa maksud Pemerintah tidak dapat difahami setelah pengakuannya bahwa modal asing masih merajalela di Indonesia, terutama modal Belanda, sementara diinsyafi pula akan perlu dan pentingnya pelaksanaan politik ekonomi nasional, Pemerintah justru hendak membuka pintu selebar-lebarnya dan mengundang masuk modal asing untuk bergerak lebih leluasa lagi dalam kehidupan perekonomian negeri kita.

Saya kira bukanlah suatu kebetulan bahwa mengenai persoalan ini justru Pemerintah tidak memberikan jawaban yang terang seperti terhadap persoalan-persoalan lainnya yang tercantum dalam laporan Gabungan Bagian-bagian itu.

Pemerintah sendiri mengakui dengan terus terang, seperti dinyatakan di dalam penjelasan umum daripada, rancangan Undang-undang Penanaman Modal Asing, bahwa sebagai akibat politik pemerintah Hindia-Belanda, artinya pemerintah kolonial, maka pada saat penyerahan kedaulatan pada akhir 1949, keadaan perekonomian di Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut: lapangan perdagangan internasional (impor dan ekspor), lapangan perindustrian, pertambangan yang mempergunakan mesin, lapangan perkebunan besar yang bekerja untuk ekspor bahan mentah yang bermutu tinggi, lapangan transpor, kecuali kereta api dan telekomunikasi yang dari zaman Hindia-Belanda dimiliki oleh Pemerintah, praktis seluruhnya dikuasai dan diselenggarakan

oleh bangsa asing, terutama perusahaan Belanda; perdagangan dalam-negeri (*interinsulair* dan perdagangan daerah) dari tingkat grosir sampai perdagangan detail pada umumnya diselenggarakan oleh golongan penduduk Tionghoa, yang sebagian besar setelah penyerahan kedaulatan termasuk golongan warga-negara Indonesia, dan hasil bahan makanan terutama beras diselenggarakan pada umumnya oleh rakyat dalam bentuk areal perseorangan yang sangat kecilnya (rata-rata 1/3 ha seorang). Apa yang diakui sendiri oleh Pemerintah ini sampai sekarang masih tetap berlaku. Barangkali hanya ada satu perubahan yang sudah terang dan pasti, ialah di lapangan transpor, sebagai akibat daripada meningkatnya perjuangan pembebasan Irian Barat, monopoli K.P.M. telah dihapuskan.

Sedangkan mengenai perusahaan-perusahaan Belanda lainnya yang berkedudukan di Indonesia masih menggantung, belum ada kepastiannya. Tetapi Pemerintah sekarang bukannya secara tegas dan konkrit mengambil tindakan-tindakan untuk melikuidasi sama sekali kekuasaan modal Belanda, meskipun sudah sangat didorong oleh perjuangan pembebasan Irian Barat, dan belum lagi bicara sama sekali tentang melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap modal besar asing lainnya, malahan mengajukan rancangan Undang-undang untuk mengundang masuknya modal asing yang baru, yang berarti akan memperkuat modal asing yang sudah ada.

Pemerintah dengan secara terus terang menyatakan sependapat bahwa soal penanaman modal asing ini tidak dapat dihubungkan dengan soal penghapusan persetujuan Konferensi Meja Bundar, sebab yang dimaksud dengan “modal asing” ialah modal dari segala sudut dunia. Hal ini sudah tentu sangat mengecewakan. Sebab rakyat mengharapkan bahwa dengan pembatalan persetujuan Konferensi Medja Bundar dimaksudkan untuk melikuidasi kekuasaan modal Belanda, yaitu modal asing yang terbesar di Indonesia dan paling banyak menghisap keringat dan kekayaan alam Indonesia.

Selama ini karena berkuasanya modal besar Belanda ekonomi Indonesia adalah ekonomi kolonial Belanda. Jadi dengan sendirinya jika rakyat Indonesia hendak membangun ekonomi nasional Indonesia, maka terlebih dulu kekuasaan modal Belanda itu harus

dilikuidasi, dan berangsur-angsur membatasi, dan akhirnya, juga melikuidasi modal besar asing lainnya.

Perjuangan nasional kita melawan imperialisme Belanda pada hakekatnya adalah perjuangan melawan modal Belanda. Jika rakyat Indonesia pertama-tama berjuang untuk merebut kekuasaan politik, dari tangan Belanda, maka hal ini tidak lain karena kekuasaan politik yang didirikan oleh Belanda di Indonesia adalah justru untuk melindungi dan menjamin keamanan modal Belanda di dalam memeras tenaga rakyat dan kekayaan alam Indonesia.

Oleh karena itu melawan kolonialisme atau imperialisme adalah sama dengan melawan modal asing. Imperialisme adalah identik dengan penanaman modal asing atau ekspor modal.

Pengertian yang semacam ini tidak hanya dimiliki oleh kaum buruh Komunis.

Bung Karno dalam tulisannya “*Mentjapai Indonesia Merdeka*” menyatakan: “Sejak adanya *opendeur-politiek* di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk ke Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Belanda saja, tetapi juga modal Inggeris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal Jerman, juga modal Perancis, juga modal Italia, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah imperialisme yang internasional karenanya. Raksasa ‘biasa’ yang dulu berjengkelitan di atas pada kerezekian Indonesia, kini sudah menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut sepuluh”.

Dari tulisan Bung Karno ini, jelaslah bahwa beliau juga mengartikan penanaman modal asing sama dengan imperialisme. Oleh karena itu pula sesuai dengan pernyataan Bung Karno, yang saya kutip di atas ini, dengan rancangan Undang-undang yang akan mengundang masuk modal asing dari segala sudut dunia tidak bisa diartikan lain kecuali memperkuat kedudukan imperialisme internasional yang sudah bercokol di negeri kita selama ini.

Memang ada juga percobaan orang untuk memberikan arti yang lain daripada perkataan imperialisme. Dr. Hatta, misalnya, telah mencoba menciptakan istilah baru, yaitu “imperialisme ideologi.” Barangkali maksudnya sebagai usaha untuk mengurangi arti jahat daripada imperialisme yang sesungguhnya. Tetapi harian *Pemuda*

yang sama sekali bukan komunis telah menunjukkan bagaimana tidak benarnya istilah baru daripada imperialisme yang diciptakan oleh Dr. Hatta itu.

Dalam editorialsnya pada tanggal 30 Juli, ketika mengupas “permainan kotor dan berbahaya” yang dilakukan oleh imperialisme Amerika terhadap Indonesia, harian *Pemuda* antara lain menulis: “Dan istilah baru ‘imperialisme ideologi’ itu kentara benar dibikin-bikin, seakan-akan orang dengan gampang bisa bikin istilah baru dari istilah ‘imperialisme’ itu, misalnya ‘imperialisme relig,’ ‘imperialisme seni,’ dan sebagainya.”

Dengan menunjukkan arti daripada penanaman modal asing yang identik dengan imperialisme, saya tidak hendak terus begitu saja menarik kesimpulan, bahwa setiap orang yang membela politik penanaman modal asing berarti lahir-batin orang itu juga membela politik imperialisme. Memang ada golongan yang membela politik penanaman modal asing karena mereka itu sesungguhnya adalah agen-agen imperialisme. Tetapi ada juga orang yang menyetujui penanaman modal asing dengan perhitungan seakan-akan penanaman modal asing itu bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan bisa membantu perkembangan ekonomi nasional.

Terhadap Pemerintah yang rupanya juga memperhitungkan bahwa penanaman modal asing itu bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan membantu perkembangan ekonomi nasional, fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia, ingin menunjukkan kenyataan bahwa selama ini di Indonesia sudah bercokol cukup banyak modal asing, tetapi justru karena kekuasaan modal asing ini maka ekonomi nasional Indonesia tidak bisa berkembang dan tingkat penghidupan rakyat sangat rendah.

Terhadap orang-orang yang mewakili golongan, atau partai yang suka menyerukan bukan saja semboyan “anti-imperialisme” tetapi juga “anti-kapitalisme,” dan menyetujui rancangan Undang-undang Penanaman Modal Asing ini, saya ingin bertanya apakah sikap ini tidak langsung bertentangan dengan semboyan-semboyan itu dan akan bisa menghilangkan kepercayaan pengikut golongan atau partai itu? Sebab hal ini tidak saja berarti menyetujui kapitalisme pada umumnya, tetapi terutama berarti menyetujui kapitalisme asing merajalela di Indonesia.

Kami kaum Komunis selalu menyatakan, bahwa meskipun kami anti-kapitalisme pada umumnya, tetapi untuk tingkat perjuangan sekarang, demi untuk melawan imperialisme, yaitu melawan kapitalisme asing, kami mau bersatu dengan kaum kapitalis nasional yang anti-imperialis.

Hal ini tidak berarti bahwa kami kaum Komunis tidak berusaha membantu perjuangan kaum buruh untuk perbaikan nasibnya terhadap kaum kapitalis bangsa Indonesia sendiri. Misalnya terhadap perjuangan perbaikan nasib dari kaum buruh pabrik kaus yang menjadi miliknya Mr. Kasman, kami kaum Komunis sudah tentu berdiri di pihak kaum buruh.

Fraksi Partai Komunis Indonesia bersikap anti-penanaman modal asing, tegasnya bersikap konsekuen anti-imperialisme, bukanlah karena sentimen, seperti anggapan beberapa orang. Kami anti-penanaman modal asing karena keyakinan kami bahwa dengan penanaman modal asing atau dengan imperialisme bukan saja tidak akan bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan mengembangkan ekonomi nasional, tetapi malahan akan menghancurkan kedua-duanya. Tidak ada kaum imperialis di dunia ini yang menanamkan kapitalnya di manapun juga berdasarkan perasaan peri-kemanusiaan untuk menolong sesama manusia.

Karena modal atau kapital memang tidak mempunyai perasaan, apalagi perasaan kemanusiaan. Kapital adalah kekuatan buta yang hanya bisa hidup dengan menghisap tenaga kaum buruh.

Supaya bisa lebih meyakinkan, saya kira ada baiknya jika saya meminjam perkataan orang lain yang sama sekali bukan Komunis, bahwa pembangunan ekonomi dengan penanaman modal asing tidak mungkin memberikan kemakmuran kepada rakyat. Orang lain yang akan saya pinjam perkataannya dalam hal ini ialah kebetulan Dr. Hatta sendiri.

Dalam karangannya “*Soal industrialisasi bagi Indonesia*” Dr. Hatta antara lain menulis:

“Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran untuk rakyat, perkataan-perkataan ‘kemakmuran’

untuk rakyat,’ (perkataan-perkataan, ‘kemakmuran untuk rakyat’ *dionderstrip* oleh Dr. Hatta sendiri) mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau dari pihak Pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.

Pedoman bagi mereka artinya bagi penanam modal asing untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan yang diharapkannya mestilah lebih daripada yang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnya itu.

Supaya keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendaknya supaya dipilih macam industri yang bakal diadakan, dan jumlahnya tidak boleh banyak. Berhubung dengan keadaan industri, agraria dan tambang yang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu. Dan dengan jalan itu tidak tercapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanya mengadakan pabrik-pabrik baru menurut keperluan kapitalis luar negeri itu saja. Sebab itu, industrialisasi dengan kapital asing tidak dapat diharapkan.”

Saya tidak tahu apakah Dr. Hatta sekarang ini masih tetap berpendirian seperti apa yang dituliskannya belasan tahun yang lalu, sebab ini ditulis sebelum revolusi. Tetapi bagaimanapun juga apa yang ditulis oleh Dr. Hatta ini adalah suatu kebenaran yang tetap berlaku sampai sekarang. Oleh karena setiap orang yang mau mencari kebenaran dan berani menjunjung tinggi kebenaran, dari pihak manapun juga datangnya kebenaran itu, tentunya tidak akan sampai hati untuk tinggal diam tidak menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa penanaman modal asing memang tidak akan bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat. Sebab seperti diakui oleh Dr. Hatta sendiri, pedoman bagi kaum kapitalis asing untuk menanamkan kapitalnya di Indonesia ialah keuntungan, dan bukan keuntungan yang biasa, melainkan keuntungan yang lebih dari pada yang biasa.

Dilihat dari sudut dorongan bagi setiap penanam modal asing ialah tidak bisa lain daripada mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dapat dipastikan sejak semula bahwa penanaman modal asing itu memang tidak akan mungkin membawa perbaikan bagi tingkat penghidupan rakyat maupun bagi perkembangan ekonomi nasional Indonesia.

Rakyat banyak, dari kaum buruh, tani sampai kepada pengusaha nasionalnya, berdasarkan pengalamannya sendiri dalam praktek,

menjadi lebih teguh dalam sikapnya menolak penanaman modal asing.

Pengalaman selama 6 tahun di bawah perjanjian Konperensi Meja Bundar membuktikan, bahwa meskipun kekuasaan politik ada di tangan bangsa Indonesia tetapi modal besar asing dibiarkan terus berkuasa, maka struktur kolonial daripada ekonomi Indonesia tidak berubah. Sebagai akibatnya, kaum buruh hidup dengan upah yang nilainya setiap tahun merosot, karena harga barang-barang kebutuhan hidup buatan dalam dan luar-negeri terus naik. Ini adalah permainan harga yang dilakukan oleh modal besar asing dalam mengejar keuntungan sebesar-besarnya di lapangan perdagangan. Tanah-tanah perkebunan yang kosong, yang sudah lama dikerjakan oleh kaum tani dirampas kembali. Di belakang pengusiran-pengusiran kaum tani dari tanah garapannya berdirilah kepentingan kaum modal besar asing. Pengusaha-pengusaha nasional sama bangkrut karena tidak sanggup bersaing dengan modal besar asing yang masih menguasai ekspor dan impor. Anggaran Belanja Negara terus-menerus mengalami defisit rata-rata tiap tahunnya 2.600 juta rupiah, sedangkan modal besar asing di Indonesia menurut taksiran ahli-ahli asing sendiri mengangkut keuntungan tiap tahunnya ke luar-negeri kurang lebih sebesar 15.000 juta rupiah, suatu jumlah yang hampir sama besarnya dengan seluruh pengeluaran negara rata-rata tiap tahunnya.

Belum lagi berbicara tentang keuntungan modal besar asing ditambah minyak, yang mendapat hak-hak istimewa seperti *let alone agreement*, yaitu peraturan yang membolehkan mereka menguasai sendiri devisennya dari hasil ekspor minyak.

Kecuali keuntungan yang secara terang bisa ditransfer, modal asing masih bisa juga melakukan transfer secara gelap, seperti pernah terbukti dengan tertangkapnya penyelundupan-penyelundupan devisa bangsa asing dan pembantu-pembantunya yang setia dari kaum modal asing. Juga penyelundupan-penyelundupan devisa bisa dilakukan oleh modal besar asing melalui ekspor bahan mentah, dengan mempermainkan kualitas, harga dan kuantitas barang-barang ekspor dan impor. Saluran moneterpun mereka gunakan dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari adanya perbedaan kurs resmi dan gelap dari mata uang rupiah kita terhadap mata uang asing. Sekarang inipun dengan adanya



Bukti Ekspor yang dimaksudkan sebagai pendorong ekspor dan dengan harapan bisa mencegah barter karena secara tidak langsung kurs gelap dari mata uang rupiah kita terhadap mata uang asing menjadi diresmikan, kaum modal besar asing juga memperoleh keuntungan lebih besar karena merekalah yang menguasai bahan-bahan ekspor dan melakukan impor dan ekspor.

Pemerintah sampai sekarang belum pernah bisa memberikan keterangan mengenai jumlah seluruhnya daripada modal asing di Indonesia. Tetapi menurut laporan hasil penyelidikan ekonomi Indonesia oleh *White Engineering Corporation New York*, yang ditugaskan oleh Pemerintah sendiri, dinyatakan bahwa modal asing di Indonesia seluruhnya berjumlah 2.100 juta *dollar* Amerika atau jika di-kurs dengan nilai rupiah Indonesia sekarang sama dengan 2.100 juta X Rp. 38 = Rp. 89.800 juta. Dari jumlah modal asing yang ada sekarang saja keuntungan rata-rata yang diangkut ke luar-negeri sudah sama dengan pengeluaran negara kita rata-rata setiap tahunnya. Jadi, jika modal asing ini ditambah lagi dengan penanaman modal baru, maka berartilah bahwa akan semakin bertambah banyak tenaga rakyat yang diperas dan kekayaan alam Indonesia yang dikuras dan diangkut ke luar negeri.

Bahwa bertambah besarnya penanaman modal asing tidak membawa kemakmuran rakyat, juga diberikan contohnya oleh negeri-negeri lain di Indonesia, seperti misalnja negeri-negeri di Timur Tengah. Negeri-negeri di Timur Tengah adalah negeri-negeri yang kaya dengan minyak, menghasilkan 20% daripada produksi minyak dari seluruh dunia kapitalis. Dalam tahun 1956 misalnya, produksi minyak negeri-negeri di Timur Tengah berjumlah 172 juta ton. Dibandingkan dengan Indonesia jumlah ini adalah sangat besar. Indonesia menghasilkan minyak hanya 1½ sampai 2% dari produksi dunia kapitalis. Dalam tahun 1956 misalnya, Indonesia menghasilkan 12,7 juta ton.

Modal asing yang berlomba-lomba menguras kekayaan minyak di Timur Tengah ini ialah Amerika, Inggris, Belanda dan Perancis.

Dalam produksi minyak ini Amerkia menguasai modal yang paling besar. Amerika mengontrol 100% produksi minyak di Saudi Arabia dan Bahrain; 50% di Kuwait, 25% di Irak dan 40% di Iran.

Dengan penanaman modal asing dalam pertambangan minyak ini, bukanlah rakyat-rakyat Timur Tengah yang mengalami kemakmuran, melainkan sebaliknya. Kaum buruh Arab misalnya, di lapangan kerja modal asing ini harus bekerja dari 10 sampai 12 jam sehari dengan upah hanya 1/8 dari upah buruh Amerika untuk pekerjaan yang sama dan dalam maskapai yang sama juga.

Sebaliknya keuntungan kaum modal asing di Timur Tengah dari minyak ini saja pada tahun 1955 berjumlah \$ 1.850 juta sedangkan selama sepuluh tahun sebelumnya rata-rata setiap tahunnya hanya 800 juta.

Modal Amerika saja mendapat keuntungan sebesar \$ 900 juta dalam tahun 1956 (Menurut *Journal des Carburants*, No. 210 Dec. 1956).

Keuntungan yang berlimpah-limpah ini bisa dimengerti jika mengingat tenaga buruh dan ongkos-ongkos produksi lainnya yang rendah di Timur Tengah. Ongkos produksi minyak di Timur Tengah tiap ton hanya antara \$ 0,70 sen sampai paling tinggi \$ 2. Padahal di Amerika harga pasar daripada minyak Amerika tiap ton sebesar \$ 15.

Menurut kalkulasi yang dibuat oleh "Survey of Current Business" ekspor modal Amerika dalam bentuk penanaman modal langsung dalam tahun 1953-1955 ke India, Indonesia dan Filipina berjumlah \$ 66 juta, sedangkan jumlah keuntungan yang didapat oleh Amerika dari negeri-negeri ini selama periode yang sama berjumlah \$ 241 juta dan dari jumlah ini \$ 203 juta ditransfer ke Amerika. Jadi dari modal \$ 66 juta dalam tempo tahun 1953-1955 kembali langsung \$ 203 juta.

Dari fakta-fakta di atas ini bertambah kuatlah pembuktian bahwa penanaman modal asing sekali-kali bukannya mendatangkan kemakmuran melainkan kemiskinan bagi rakyat dan sebaliknya hanya memberikan keuntungan yang besar bagi modal asing sendiri.

Tetapi penanaman modal asing bukan saja mendatangkan kemiskinan di kalangan rakyat. Ia juga menjadi saluran dan alasan untuk intervensi asing dengan segala gerakan subversif dan gerakan militernya. Kejadian di Timur Tengah dengan pendaratan tentara

Amerika dan Inggris masing-masing di Libanon dan Yordania adalah merupakan contoh yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini. Rakyat Indonesia sendiri langsung mengalami bagaimana kaum imperialis Amerika dalam usahanya membantu kaum pemberontak P.R.R.I/Permesta sudah hampir-hampir saja mendaratkan pasukan-pasukan militernya di Pakan Baru dengan dalih untuk melindungi kepentingan miliknya yang berupa perusahaan tambang minyak dan untuk melindungi keselamatan jiwa warga-negaranya yang bekerja dalam perusahaan itu.

Ada orang seperti Jusuf Wibisono, misalnya, pernah mengatakan: “Tidak usah takut terhadap masuknya modal asing di Indonesia. Bukankah karena mereka harus tunduk pada peraturan-peraturan yang kita buat sendiri?”

Dengan tidak mempertimbangkan lebih dahulu apakah orang yang suka berbicara seperti ini cukup mempunyai pendirian yang patriotik atau tidak, tetapi tidak dapat disangkal, bahwa sekali orang itu sudah mengundang masuk modal asing, maka ia juga mau tidak mau akan berusaha untuk memberikan syarat dan jaminan untuk bekerjanya modal asing itu secara yang menguntungkan. Sebab tanpa syarat-syarat dan jaminan yang menguntungkan bagi kaum modal asing, maka tak mungkinlah mereka suka menanamkan modalnya.

Apakah syarat-syarat dan jaminan yang dikehendaki oleh setiap penanam modal asing?

Dari Laporan Kongres ke-VII dari *Internasional Fiscal Association* (I.F.A.) dalam bulan September 1953, dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang mengenai keamanan luar dari negeri-negeri yang mengimpor modal. Terutama politik luar-negeri dari negeri yang mengimpor modal harus menyesuaikan diri dengan negeri yang mengekspor modal.
2. Syarat-syarat mengenai keamanan dalam-negeri dan stabilitas politik. Dengan ini diharapkan bahwa sekali sesuatu Pemerintah menerima penanaman modal asing, maka harus dijaga jangan sampai gampang terjadi perubahan Kabinet, harus dicegah timbulnya ketegangan sosial yang berupa pemogokan-pemogokan

buruh, dan sebagainya. Gerakan politik yang menuntut nasionalisasi perusahaan asing harus dibendung atau ditindas.

3. Syarat-syarat mengenai stabilitas ekonomi, misalnya mengenai kemungkinan ada atau tidak adanya devaluasi mata uang, jaminan lalu-lintas devisa dan transfer keuntungan serta penghasilan-penghasilan lain dari perusahaan-perusahaan asing ke luar-negeri.

4. Syarat psikologis di kalangan rakyat. Dalam hal ini penanaman modal asing menghendaki supaya semangat anti-modal asing ditindas, terutama di kalangan kaum dan rakyat pekerja lainnya, apabila ternyata semangat ini terlalu kuat.

5. Syarat-syarat yang mengenai pajak di negeri yang mengimpor modal, yaitu supaya ada persetujuan dengan negeri yang mengeksport modal. Misalnya untuk menghindari pajak double, modal asing yang sudah dikenakan pajak di negerinya sendiri supaya tidak dikenakan pajak di negeri yang mengimpor modal, dan kalau pun kena pajak supaya pajak yang tidak berat, dan sebagainya.

Semua syarat-syarat yang dikehendaki oleh kaum imperialis seperti di atas ini setiap orang tentu dapat memahaminya. Karena hanya dengan syarat-syarat yang demikian itu modal asing akan bisa terjamin keamanan dan keuntungannya. Tanpa syarat-syarat yang demikian ini, tak akan ada penanam modal asing dari manapun juga yang akan suka menanamkan modalnya.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa rakyat lebih gampang untuk mentafsirkan bahwa mengundang masuk modal asing berarti mengundang kaum kapitalis asing atau kaum imperialis untuk mencampuri bukan saja urusan ekonomi tetapi juga urusan politik negerinya. Lebih-lebih jika kebetulan yang berkuasa dalam pemerintahan adalah orang-orang dari partai yang terkenal sebagai pembela kepentingan modal asing, seperti ketika zamannya Kabinet Sukiman, Kabinet Boerhanuddin Harahap dan sebagainya.

Jika sekarang ini hendak mengundang masuk modal asing, negeri-negeri manakah kiranya yang paling bernafsu untuk menyambutnya?

Sebelum perang dunia pertama, ekspor modal ke Asia yang bersifat modal jangka panjang (*long term capital*), yaitu yang melebihi

jangka waktu satu tahun, adalah Inggris, Perancis dan Belanda. Tetapi kerusakan-kerusakan dalam perang dunia pertama dan kedua, serta pergeseran-pergeseran dalam kekuasaan ekonomi dan politik internasional sesudah perang dunia kedua, telah menyebabkan ketiga negeri tersebut tidak lagi menjadi negara-negara pemberi hutang yang penting, tetapi malahan menjadi negara yang banyak berhutang, terutama kepada Amerika. Ditambah lagi dengan perang-perang kemerdekaan di negeri kolonial mereka telah menyebabkan kedudukan negara-negara imperialis Eropah semakin lemah di lapangan ekonomi dan politik. Berhubung dengan itu Amerikalah yang sekarang memegang peranan utama dalam penanaman modal di negeri-negeri lain, terutama di negeri-negeri yang ekonominya terbelakang. Kesempatan ini jugalah yang telah digunakan oleh Amerika untuk menguasai ekonomi negeri-negeri itu dan mengikatnya secara politik dan militer.

Amerika Serikat selama 1947-1950 mengeksport modal untuk ditanam di negeri lain secara langsung sebanyak \$ 1.200 juta setahun. Dari jumlah ini Asia menerima \$ 250 juta penanaman modal asing, dan 80% dari modal itu ditanam di lapangan minyak.

Jika kita ambil periode 1946-1952, maka Amerika Serikat adalah yang paling besar mengeksport modal partikelir. Untuk penanaman modal di luar negeri selama itu Amerika Serikat mencatat \$ 9,2 milyar (sumber: Ecosoc P.B.B.). Dari penanaman modal ini Amerika mendapat keuntungan \$ 43,4 milyar.

Di samping Amerika Serikat, pada waktu sekarang ini Jerman Barat juga, mempunyai kelebihan modal dan sedang mencari pasaran untuk penanaman modalnya. Oleh karena itu, monopoli Jerman dan monopoli Amerika Serikat sekarang ini sedang berusaha mendapatkan tempat penanaman modal, yang sudah tentu dicarinya terutama negeri-negeri yang terbelakang ekonominya, yang bisa memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh mereka di lapangan politik, ekonomi, dan sosial. Demikian juga Jepang, antara lain berdasarkan lampiran persetujuan pampasan, Jepang dapat kita ketahui bahwa ia sedang mencari kesempatan untuk bisa masuk ke Indonesia dengan modal dagangnya.

Berdasarkan semuanya ini, maka jika Indonesia harus menciptakan

apa yang dinamakan iklim yang baik buat penanaman modal asing, maka tidak bisa lain kecuali harus memenuhi keinginan kaum monopoli Amerika Serikat. Di sinilah menurut fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia letak gawatnya politik mengundang modal asing pada waktu sekarang ini.

Dengan berbagai alasan dan bukti-bukti saya telah berusaha menerangkan apa sebabnya kami kaum Komunis tidak menyetujui politik penanaman modal asing, tetapi apakah dengan ini berarti bahwa kami tidak mengakui perlunya bantuan modal luar-negeri untuk pembangunan ekonomi negara kita. Sekali-kali tidak demikian. Kami mengetahui bahwa untuk pembangunan ekonomi negara kita diperlukan bantuan barang-barang modal, tenaga-tenaga ahli dan pembiayaan pembangunan juga dari luar negeri. Kami mengakui akan keperluan-keperluan semuanya itu untuk bisa mempercepat usaha membangunkan ekonomi negara kita, hanya saja menurut pendapat fraksi kami jalannya untuk memperoleh bantuan modal luar negeri itu bukanlah dengan penanaman modal asing baru. Fraksi kami berpendapat bahwa Pemerintah dapat mengatasi kekurangan dalam hal modal untuk pembangunan itu dengan mengadakan hubungan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara manapun juga yang sanggup dan bersedia memberikan bantuan untuk memperkembangkan ekonomi Indonesia, tetapi tanpa ikatan politik dan militer.

Bantuan ekonomi dan teknik yang selama ini sudah bisa diperoleh, baik dari negara-negara Barat maupun Timur masih bisa lebih dipergiat lagi.

Yang selama ini terasa benar kekurangannya di pihak Pemerintah, ialah dalam mengkoordinasi bantuan-bantuan ekonomi dan keuangan yang sudah diperoleh dari luar negeri itu dengan rencana pembangunan yang konkrit di dalam negeri. Karena penggunaan bantuan-bantuan ekonomi dan teknik serta keuangan, baik dari Barat maupun dari Timur kurang dikoordinasi secara tepat, maka sekarang ini timbul keganjilan, bahwa di satu pihak kita melihat hutang-hutang dari luar negeri sudah boleh dikatakan cukup banyak juga, tetapi di pihak lain kita melihat pembangunan ekonomi negara kita tetap macet juga.

Menurut pendapat kami bantuan-bantuan ekonomi atau

pinjaman-pinjaman luar negeri harus dibayar kembali dengan hasil-hasil tambang dan hasil-hasil perkebunan yang dikuasai oleh Pemerintah, lebih-lebih lagi jika perusahaan-perusahaan Belanda, yang sudah diambil-alih oleh Pemerintah itu tetap dikuasai dan dijadikan milik negara dan diusahakan oleh Pemerintah. Dengan jaminan bahwa keuntungan daripada perusahaan-perusahaan itu akan jatuh di tangan negara, maka sudah pasti bahwa kaum buruh akan bersedia untuk berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu produksi. Di samping kekurangan Pemerintah di dalam mempergunakan bantuan-bantuan ekonomi dan kredit-kredit luar negeri, juga selama ini kekurangan yang menonjol dari Pemerintah ialah di dalam politik pemberian kreditnya. Ratusan juta rupiah kredit, telah diberikan oleh Pemerintah, kepada usaha partikelir dan perseorangan, tetapi kredit ini bukan saja tidak dipergunakan sebagaimana semestinya untuk membantu perbaikan ekonomi, tetapi malahan sama sekali tidak kembali, sehingga dalam hal ini hanya bisa dikatakan pemborosan uang negara secara besar-besaran.

Oleh karena itu fraksi kami berpendapat, bahwa seharusnya politik kredit Pemerintah diubah dan dititik-beratkan kepada kredit untuk produksi, berlainan dengan syarat-syarat pemberian kredit yang berlaku selama ini, sebaiknja *zakelijke borg* didasarkan kepada kapasitas produksi satu tahun, agar bisa dijamin pengembalian kredit-kredit yang diberikan oleh Pemerintah.

Jika kelemahan-kelemahan Pemerintah di dalam mempergunakan bantuan-bantuan dan kredit-kredit luar negeri serta kelemahan-kelemahan dalam politik pemberian kreditnya bisa diperbaiki, maka barulah dapat diharapkan bahwa akan bisa dilakukan usaha-saha yang lebih sungguh-sungguh menuju pada perbaikan ekonomi Indonesia.

Akhirnya berdasarkan keyakinan, bahwa penanaman modal asing tidaklah akan membawa perbaikan pada tingkat penghidupan rakyat dan tidak akan membantu perkembangan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya hanya akan memperkuat kedudukan ekonomi dan politik kaum imperialis di negeri kita, maka fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia, ingin mengajak kepada semua orang yang mewakili kaum marhaenis, yang sudah tentu anti-imperialis, dan semua orang yang mewakili kaum muslimin, yang juga sudah

tentu tidak menyetujui pemerasan tenaga rakyat, dan pengurusan kekayaan alam oleh kaum kapitalis asing dan juga kepada orang-orang lainnya untuk bersama-sama menyarankan kepada Pemerintah, supaya sebaiknya Pemerintah menarik atau sekurangnya menunda saja dahulu rancangan Undang-undang Penanaman Modal Asing ini. Dan sebagai gantinya supaya Pemerintah lebih menyegerakan pembuatan rancangan Undang-undang Dewan Perancang Nasional sebagai langkah pertama menuju pembuatan rancangan Undang-undang mengenai rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

